



## PUTUSAN

Nomor 63/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. Robert Edison Siahaan;**

TTL : Balige, 29 April 1959;

Pekerjaan : Walikota Pematangsiantar Periode 2005-2010;

Alamat : Jalan Kapten M.H. Sitorus Nomor 18, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

2. Nama : **H. Burhan Saragih, S.H.;**

TTL : S. Raya, 5 Januari 1955;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Surya Nomor 24, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nuralamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., Nazrul Ihsan Nasution, S.H., Martin O. Simanjuntak, S.H.**; para Advokat pada "Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners" yang beralamat di Jalan Bakti Komplek Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Gaperta Ujung, Medan - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar**, berkedudukan di Jalan Porsea Nomor 3 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Yusmanizar, S.H., Marwan Hasibuan, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M. Aswin Diapari Lubis, S.H., Syahrizal Hadi Harahap, S.H., Khomaidi H. Siambaton, S.H., Suriadi, S.H., dan Daniel Panjaitan, S.H., LL.M.**; para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Syahruzal Yusuf & Associates" yang beralamat kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon/Faksimili: 061-6637921, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.4]** Nama : **Hulman Sitorus, S.E.**;

NIK : 1272.01.020256.0003

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Pematangsiantar;

Alamat : Jalan Nauli Nomor 19, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Nama : **Drs. Koni Ismail Siregar**;

NIK : 1272.07.030466.0001

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 167, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Yusmanizar, S.H., Marwan Hasibuan, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M. Aswin Diapari Lubis, S.H., Syahrizal Hadi Harahap, S.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., dan Suriadi, S.H.**;

para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Syahrul Yusuf & Associates" yang beralamat kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 48-B, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon/Faksimili: 061-6637921, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 221/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Juni 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

### **1. Tentang Objek Permohonan Keberatan**

- 1.1. Bahwa Objek Permohonan Keberatan Pemohon adalah:
- a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**Bukti P-1**);
  - b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**Bukti P-2**);

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, objek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.3. Bahwa oleh karena objek permohonan keberatan Pemohon *a quo* berkenaan dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Pemohon *a quo* [*vide* Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah];

## **2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- 2.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan:
  - a. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010  
**(Bukti P-3);**

- b. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 **(Bukti P-4);**

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon;

2.3. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **3. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan;

3.2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon

Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 adalah Kamis, 17 Juni 2010; Jum'at, 18 Juni 2010; dan Senin, 21 Juni 2010;

- 3.3. Bahwa permohonan keberatan Pemohon *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Senin, 21 Juni 2010, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menerima permohonan Pemohon *a quo*;

#### 4. Tentang Pokok Permohonan

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA
1.	Ir. MAHRUM SIPAYUNG, M.Si. dan H. EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos.	12.188
2.	Ir. ROBERT EDISON SIAHAAN dan H. BURHAN SARAGIH, S.H.	31.489
3.	Prof. Dr. POLTAK SINAGA, M.Si. dan Drs. JALAEEL SARAGIH	943
4.	HEROHWIN T.F. SINAGA, AP. M.Si. dan Hj. FRIDA RIANI DAMANIK	4.269
5.	Dr. RIA NOFIDA TELAUMBANUA, M.Kes. dan Drs. SURYATNO	3.981
6.	MOH. HERIZA SYAHPUTRA, S.H. dan HORAS SILITONGA	13.804
7.	HULMAN SITORUS, S.E. dan Drs. KONI ISMAIL SIREGAR	39.585

8.	Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes. dan RUPINA ARUAN, S.Pd.	476
9.	FRANS IMMANUEL T. SARAGIH, S.Sos. dan Dra. ROKIBAH HASIBUAN, M.A.	432
10.	BARKAT SHAH dan Ir. BOUNDETH DAMANIK	12.118
<b>Jumlah</b>		<b>119.285</b>

- 4.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 7, Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sah 39.585 (*tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima*) suara atau 33,18 % (*tiga puluh tiga koma delapan belas persen*);
- 4.3. Bahwa akan tetapi Pemohon sangat keberatan dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tersebut, sebab proses

penyelenggaraan Pemilu pada tersebut tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, bahkan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor 7, yaitu Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar;

4.4. Bahwa pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon *a quo* adalah sebagai berikut:

4.4.1. Bahwa Termohon pada tanggal 6 Juni 2010 (pada masa tenang) membuat pengumuman dengan Surat Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 (**Bukti P-5**) yang isinya menguraikan tentang gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang terdapat pada identitas H. Burhan Saragih (*in casu* Pemohon *cq.* Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 2) pada seluruh dokumen Pemilu pada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dinyatakan dan dianggap tidak ada;

Pengumuman yang dibuat oleh Termohon *a quo*, melalui PPK, PPS dan KPPS telah ditempatkan dan ditempelkan pada TPS-TPS di Kota Pematangsiantar, bahkan Termohon juga memuat pengumuman tersebut di Harian Siantar 24 Jam terbitan Selasa, 8 Juni 2010 dan di Harian Metro Siantar terbitan Rabu 9 Juni 2010, padahal keberadaan kelengkapan syarat pendidikan H. Burhan Saragih tersebut telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Termohon pada tahap pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**vide Bukti P-3 dan Bukti P-4**);

Seandainya pun, *quod non*, gelar kesarjanaannya H. Burhan Saragih diragukan keabsahannya seharusnya Termohon mengembalikan persyaratan tersebut kepada yang bersangkutan pada saat penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan ijazah pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang dimiliki

H. Burhan Saragih sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Akan tetapi, pasca ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, Termohon justru membuat pernyataan di beberapa media cetak tentang keberadaan ijazah dan gelar kesarjanaannya H. Burhan Saragih yang isinya mendiskreditkan eksistensi H. Burhan Saragih sebagai Calon Wakil Walikota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

Pernyataan Termohon *a quo* di beberapa harian lokal terbitan Kota Pematangsiantar, dapat dilihat sebagai berikut:

- Melalui Harian Metro Siantar dan Harian Siantar 24 Jam pada Kamis, 20 Mei 2010, Termohon menyatakan akan secepatnya melakukan verifikasi dan jika terbukti benar maka Termohon akan mencoret Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti P-6)**;
- Melalui Harian Metro Siantar pada Sabtu, 22 Mei 2010, Termohon membuat pernyataan akan memanggil Burhan untuk dimintakan klarifikasi terkait ijazah dan gelar kesarjanaannya **(Bukti P-7)**;
- Melalui Harian Siantar 24 Jam pada Sabtu, 5 Juni 2010, Termohon membuat pernyataan bahwa KPU Kota Pematangsiantar telah menggelar Rapat Pleno Khusus membahas masalah ijazah dan gelar kesarjanaannya H. Burhan Saragih, akan tetapi tertunda karena KPU Sumatera Utara meminta KPU Kota Pematangsiantar **(Bukti P-8)**;

Dengan adanya pernyataan dan pengumuman yang dibuat oleh Termohon *a quo* secara sistematis (mulai dari pasca penetapan

Pemohon sebagai Pasangan Calon) dan terstruktur (dengan melibatkan seluruh penyelenggara Pemilukada), pemilih menjadi tidak simpati dan ragu-ragu terhadap keabsahan dan legalitas Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Akibatnya, Pemohon sangat dirugikan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Termohon *a quo*, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

- 4.4.2. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelitian dan klarifikasi kepada instansi terkait mengenai keabsahan persyaratan administrasi pendidikan Hulman Sitorus (*in casu* Calon Kepala Daerah Pasangan Nomor Urut 7) berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Adanya kegagalan dalam riwayat pendidikan Hulman Sitorus, khususnya ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Perguruan Tinggi, menunjukkan bahwa dokumen yang dipergunakan oleh Hulman Sitorus pada saat pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sangat diragukan keabsahannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 4 RK Pematangsiantar dan yang dipergunakan oleh Hulman Sitorus sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pada saat pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, setelah diteliti kebenarannya oleh Pemohon ternyata Nomor Induk 214 ternyata bukan atas nama Hulman Sitorus melainkan atas nama Riana Naibaho **(Bukti P-9)**;

2. Terhadap Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Bumiputera Pematangsiantar **(Bukti P-10)**, juga terdapat adanya beberapa kejanggalan antara lain:
  - a. Masa pendidikan SLTP/SMP Hulman Sitorus adalah selama 2 (dua) tahun, hal ini dapat dilihat dari tahun penerbitan ijazah SLTP/SMP tahun 1970 dan penerbitan ijazah SD tahun 1968;
  - b. Ijazah SLTP/SMP Hulman Sitorus tersebut diterbitkan di Medan, sementara yang bersangkutan bersekolah di SMTP Bumiputera Pematangsiantar;

Dengan tidak dilakukannya klarifikasi terhadap keabsahan syarat administrasi pendidikan Hulman Sitorus maka Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan Pemilukada;

- 4.4.3. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat pendaftaran pasangan calon adalah dengan melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatannya [*vide* Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah];

Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menegaskan:

*“Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Penafsiran ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut telah dipertegas oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Nomor 106/KPU/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 (**Bukti P-11**), sehingga tidak memerlukan penafsiran lain, yaitu sebagai berikut:

- 1. Yang dimaksud dengan pengunduran diri dari jabatan negeri yaitu apabila seorang menjabat pada suatu instansi pemerintah kemudian yang bersangkutan akan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya tersebut tetapi pernyataan pengunduran diri saja tidak cukup dan harus ada persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan karena bisa saja terjadi bahwa pimpinan yang bersangkutan tidak setuju pengunduran dirinya;*
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, surat pernyataan tersebut wajib diserahkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota. Apabila belum dilengkapi pada saat pendaftaran maka berkas tersebut akan dikembalikan untuk dilengkapi sampai batas akhir waktu pendaftaran calon;*
- 3. Bahwa apabila calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PNS ...*

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pengunduran diri Drs. Koni Ismail Siregar (*in casu* Calon Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Nomor Urut 7) dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar tidak mendapat persetujuan dari Walikota Pematangsiantar sesuai dengan Surat Walikota Pematangsiantar Nomor 800/1061.1/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 perihal Pemberitahuan **(Bukti P-12)**;

Permohonan Drs. Koni Ismail Siregar dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar diajukan oleh yang bersangkutan melalui surat bertanggal 1 Maret 2010 dan baru diterima di Sekretariat Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tanggal 4 Maret 2010 **(Bukti P-13)**, sebagaimana dijelaskan oleh Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Surat Nomor 820/2541 tanggal 14 Juni 2010 perihal Penjelasan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri atas nama Drs. Koni Ismail Siregar **(Bukti P-14)**;

Dengan demikian pada saat pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh), Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar, tidak melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Drs. Koni Ismail Siregar dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;

Oleh karenanya pencalonan Hulman Sitorus, SE dan Drs. Koni Ismail Siregar sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, seharusnya ditolak oleh Termohon karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun

2005 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;

- 4.5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas merupakan kesalahan dan tindakan yang tidak profesional dari Termohon yang merugikan Pemohon. Meskipun ada prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, tetapi ada juga prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain;
- 4.6. Bahwa tindakan Termohon yang telah membuat pernyataan di beberapa media cetak tentang keberadaan gelar kesarjanaan H. Burhan Saragih dan menganulir gelar kesarjanaan tersebut melalui pengumuman resmi yang dibuat oleh Termohon dan ditempelkan di seluruh TPS di Kota Pematangsiantar dengan tujuan agar masyarakat (pemilih) mengetahuinya telah menimbulkan kerugian bagi Termohon, yaitu berkurangnya jumlah perolehan suara Termohon pada saat pemungutan dan penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Sebaliknya, penyimpangan dan pelanggaran yang sejak awal telah dilakukan oleh Termohon karena tidak melakukan penelitian dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 7 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan juga bagi pasangan calon lainnya;
- 4.7. Bahwa perlakuan yang diskrimintatif yang dilakukan oleh Termohon *a quo* sehingga memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor 7 merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta nyata-nyata telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4.8. Bahwa di samping itu, adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 beserta tim kampanyenya pada tanggal 9 Juni 2010 atau sebelum pemilih melakukan pemungutan suara di TPS, yaitu dengan memberikan *voucher* dengan nilai sebesar Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah) kepada setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga memengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 adalah juga merupakan bentuk pencideraan terhadap prinsip-prinsip demokrasi;

4.9. Bahwa meskipun *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan tujuan untuk membeli suara pemilih agar memilih Pasangan Calon yang bersangkutan adalah merupakan tindak pidana Pemilu dan tidak termasuk ke dalam ranah perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun apabila *money politic* tersebut dilakukan secara meluas dan menyebar serta secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4.10. Bahwa oleh karena Termohon dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 7 telah melakukan pelanggaran secara massif, terorganisir, dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan maka adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk membatalkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7, Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
  - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

- b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
3. Menyatakan batal demi hukum:
    - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
    - b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
  4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Pematangsiantar Tahun 2010 yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7, yaitu Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar;

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-68, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kedpala Daerah Kota PematangSiantar Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota PematangSiantar Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota PematangSiantar Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 tanggal 6 Juni 2010;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Harian Metro Siantar halaman 1 pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 dan Harian Siantar 24 Jam pada hari Kamis 20 Mei 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kliping Harian Siantar halaman 1 pada hari Sabtu 22 Mei 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Harian Siantar 24 jam halaman 1 pada hari Sabtu, 5 Juni 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 4 RK Pematangsiantar atas nama Hulman Sitorus;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Ijazah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP) yang diterbitkan oleh Kepala sekolah Menengah Tingkat Pertama Bumi Putra Pematangsiantar tanggal 21 November tahun 1970;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat KPU Nomor 106/KPU/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Walikota Pematangsiantar Nomor 800/1061.1/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 perihal Pemberitahuan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pernyataan Drs. Koni Ismail Siregar tanggal 01 Maret 2010 perihal Pengunduran Diri dari Jabatan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 820/2541 tanggal 14 Juni 2010 perihal Penjelasan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri atas nama Drs. Koni Ismail Siregar;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1738/KPU-PS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Hasil Klarifikasi Ijazah Sarjana (S1) atas Nama Burhan Saragih (Calon Wakil Walikota

Pematangsiantar Nomor Urut 2) pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010.;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1776/KPU-PS/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Penggunaan Formulir C6-KWK dan Kartu Pemilih;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1777/KPU-PS/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Penjelasan Suara Sah tentang Coblos Tembus pada Surat Suara;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota PematangSiantar Nomor 270/1778/KPU-PS/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wiwik Juliaty tanggal 16 Juni 2010, Jabatan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Siantar Utara pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martinus Jauba Lumbantoruan tanggal 19 Juni 2010, Jabatan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Siantar Martoba pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Netti Herawati tanggal 15 Juni 2010, Jabatan Divisi Pelaporan Panitia Pengawas

- Kecamatan Siantar Barat pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama David T.M Tambunan tanggal 16 Juni 2010, Jabatan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Baru pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ganda Kusuma tanggal 16 juni 2010, Jabatan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Martoba pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deddy A Butar-Butar tanggal 16 Juni 2010, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara pada Pemilukada Kota Pematangsiantar tahun 2010;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasanuddin Siregar tanggal 16 Juni 2010, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Melayu pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Efendi Ganda Tua Tampubolon tanggal 16 Juni 2010, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Suka Dame Kecamatan Siantar Utara pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama James Sitorus tanggal 16 Juni 2010, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Sigulang Gulang Kecamatan Siantar Utara pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusnan tertanggal 15 Juni 2010, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Adlin tanggal 15 Juni 2010, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Banjar pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010.;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwansyah Putra tanggal 15 Juni 2010, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Haili Azhari, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Dwikora pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ebed Nego Sidabutar tanggal 15 Juni 2010, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Simalungun pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhainy Lingga tanggal 19 Juni 2010, Jabatan Panwas Pemilu Lapangan Kelurahan Setia Negara pada Pemilukada Kota Pematangsiantar tahun 2010;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Benni S.P Marbun tanggal 16 Juni 2010, Jabatan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Siantar Utara pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010.;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sofian Simatupang tanggal 16 Juni 2010 Jabatan Staf Sekretariat Panwaslukada pada Pemilukada Kota pematangsiantar tahun 2010;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siddit Pramono tanggal 15 Juni 2010, Jabatan Sekretariat Panwas Pemilu Kecamatan Siantar Barat pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syarifuddin Hasibuan tanggal 11 Juni 2010, Jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara, Staff Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Eddy Arfandi tanggal 15 Juni 2010, Jabatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS VIII Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syaifuddin Ali Nasution tanggal 15 Juni 2010, Jabatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS IV Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sugianto tanggal 17 Juni 2010, Jabatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS IV Kelurahan Banjar Pematangsiantar Kecamatan Siantar Barat pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maludin T. Sianturi tanggal Juni 2010, Jabatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS III Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surya Atmaja tanggal 16 Juni 2010, Jabatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS III Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tongam Hutabarat tanggal 15 Juni 2010, Jabatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS VI Kelurahan Pondok

Sayur Kecamatan Siantar Martoba pada PemiluKada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosmalintje Simatupang tanggal 17 Juni 2010, Jabatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS III Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marimbun pada PemiluKada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Solahuddin Nasution tanggal 16 Juni 2010 di TPS IV Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama Rahima Boru Regar tanggal Juni 2010 di TPS V Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rosita tanggal 16 Juni 2010 di TPS XVII Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Charles Panjaitan tanggal Juni 2010 di TPS III Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Luthfy Prasetyo tanggal 15 Juni 2010 di TPS IV Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Bara Julianto Tondang tanggal 18 Juni 2010 di TPS V Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 atas nama Gempar Siburian tanggal 17 Juni 2010 di TPS III Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ramotua Sihombing pada Juni 2010 di TPS VIII Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Selatan;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sujoni tanggal 15 Juni 2010 di TPS I Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Barkat Syah dan Ir. Boundeth Damanik atas nama Amandus S. Simbolon tanggal 19 Juni 2010 di TPS II Kelurahan Suka Makmur Kecamatan Siantar Marihat;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Mohammad Heriza Syahputra dan Horas Silitonga atas nama Supriadi pada Juni 2010 di TPS VI Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 7 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Foto Dokumentasi tentang Penempelan Pengumuman di TPS III Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Foto Dokumentasi tentang Penempelan Pengumuman di TPS III Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Foto Dokumentasi tentang Penempelan Pengumuman di TPS VI Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Dokumentasi Daftar Buku Induk Nomor 214 atas nama Riana Naibaho, Bangsa Indonesia, Kampong Padomuan, Tempat dan Tanggal Lahir Laguboti, 5-5-60, Agama Prt., nama ahli waris Markus Naibaho;

62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Kepolisian Resort Pematangsiantar Nomor B/160/VI/2010/Reskrim tanggal 11 Juni 2010 perihal Pengembalian Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Kliping Harian Metro Siantar tanggal 17 Maret 2010, berita tentang “Tanpa Izin Mundur Koni Tetap Maju”;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Pematangsiantar Nomor 270-115/Panwaslukada-PS/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Kliping Harian Metro Siantar tanggal 14 Juni 2010, halaman 1, berita tentang “Voucher HOKI untuk Pedagang Kecil”;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Kliping Harian Metro Siantar tanggal 14 Juni 2010, halaman 1, berita tentang “KPU: Mendaftar Cukup Surat Mundur”;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Keterangan SMP Negeri 1 Nomor 314/105.4/SMP.01/KN/2010 tanggal 18 Juni 2010 beserta Daftar Nilai;
68. Bukti P-68 : *Soft Copy* Buku Induk SD RK 4 Siantar;

[2.3] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, **Termohon** mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan

Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi :

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon pada permohonannya tidak jelas dan kabur maka Termohon memohon pada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

**B. Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sampai dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan pendidikan gelar kesarjanaan H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil Walikota Pematangsiantar), keabsahan persyaratan administrasi pendidikan SLTP Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 7), dan surat pengunduran diri Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang merupakan koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan

administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kota Pematang Siantar [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005];

2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk sengketa hasil Pemilukada, melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi kelengkapan pendidikan para pasangan calon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
4. Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing Pasangan Calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Pematangsiantar 2010 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta masyarakat Kota

Pematangsiantar dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;

5. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain berkisar ijazah kesarjanaannya dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Calon Wakil Walikota) serta Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

### **C. Objek Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)**

1. Bahwa objek permohonan Pemohon baik di posita maupun petitum sama sekali tidak terkait dengan masalah Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**Bukti T-1**);
2. Bahwa terkait dengan dalil posita Pemohon dalam pokok permohonan maupun dalam permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun pada petitum Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan Berita Acara Pleno Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang selanjutnya telah diubah dengan Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tentang perubahan terhadap Keputusan Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang intinya seharusnya Pemohon mengajukan permohonan terhadap objek **Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010**. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut ketentuan hukum, permohonan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) (*vide* Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

3. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) maka Termohon memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil posita Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil-dalil keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

**D. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan**

1. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
2. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci

perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing pasangan calon maka berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi PemiluKada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);
4. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya-tidaknya Permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui dalam perkara ini;
3. Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan perlu ditegaskan oleh Termohon bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-2**) dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon;
4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya dapat dicermati bahwa Pemohon telah telah nyata-nyata keliru di dalam:
  - a. Mencermati fakta hukum, b. memahami hukum, c. menerapkan hukum, dan
  - d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini Termohon tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja

melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar;

6. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 pada tanggal 9 Juni 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar, dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
7. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini perlu Termohon tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampau terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata massif, terstruktur, dan sistimatis, karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu **Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010** (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);
8. Bahwa bilamana pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran

massif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon;

9. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam proses penelitian, klarifikasi, dan verifikasi adalah dalil-dalil yang hanya bersifat asumsi belaka dari Pemohon. Apalagi dalil posita Pemohon tersebut merujuk pada Surat Asosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat No. C.32/LSM-APPI/SS/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal KPUD Pematangsiantar tidak profesional atau selektif terhadap ijazah SD dan SMP Sdr. Hulman Sitorus, S.E., yang mana kedudukan hukum dari LSM yang bersangkutan terkait Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 apakah terdaftar sebagai pemantau pemilihan di Kantor KPU Kota Pematangsiantar dan telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Termohon atau belum, sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 115 s.d Pasal 122 PP Nomor 6 Tahun 2005, sebab dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut sangat jelas diatur syarat-syarat untuk menjadi pemantau Pemilukada, hak dan kewajiban Pemantau, serta larangan terhadap Pemantau. Berdasarkan data-data yang ada pada Termohon, LSM Asosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu pemantau dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang memperoleh sertifikat akreditasi dari Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 117 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2005 (**Bukti T-3**);
10. Bahwa oleh karena berdasarkan data-data dan fakta yang ada bahwa Asosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia tidak terdaftar di kantor Termohon maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil posita dari Pemohon sangat patut untuk ditolak karena bersumber dari LSM yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2005 dan juga terungkap

dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang bersumber dari LSM yang sama sekali tidak terdaftar di kantor KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 119 PP Nomor 5 Tahun 2005 yang antara lain berbunyi, "*Pemantau Pemilihan mempunyai kewajiban:*

- a. *Mematuhi kode etik pemantau pemilihan;*
- b. *Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;*
- c. *Menanggung sendiri biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;*
- d. *Membantu memastikan pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;*
- e. *Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPUD Propinsi dan atau KPUD Kabupaten/Kota, dan masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;*
- f. *Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan, serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;*
- g. *Melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;*
- h. *Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistimatis, akurat, dan dapat diverifikasi;*
- i. *Melaporkan seluruh hasil pemantauan pada KPUD";*

Berdasarkan uraian kewajiban pemantau di atas maka dapat diselami dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya hanya didasari asumsi semata dan tidak berdasar secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat patut Mahkamah dalam perkara ini menolak dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon;

11. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas

penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;

12. Bahwa terkait dengan dalil posita Pemohon dimana pada dalil posita Pemohon dikemukakan Termohon pada tanggal 6 Juni 2010 (pada masa tenang) membuat Pengumuman dengan Surat Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 yang isinya menguraikan tentang gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang terdapat pada identitas H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 2) pada seluruh dokumen Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dinyatakan dan dianggap tidak ada serta pengumuman yang dibuat oleh Termohon *a quo*, melalui PPK, PPS, dan KPPS telah ditempatkan di TPS-TPS di Kota Pematangsiantar, dan juga dikemukakan oleh Pemohon bahwa Termohon juga memuat pengumuman tersebut di Harian Siantar 24 Jam terbitan Selasa, 8 Juni 2010, dan di harian Metro Siantar terbitan Rabu 9 Juni 2010 (**Bukti T-4**);
13. Bahwa selanjutnya pada dalil posita para Pemohon tersebut, Pemohon juga mengemukakan keberadaan kelengkapan syarat pendidikan H. Burhan Saragih yang mana telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Termohon pada tahap pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan selanjutnya Pemohon mendalilkan seandainya pun, *quod non*, gelar kesarjanaaan H. Burhan Saragih diragukan keabsahannya, seharusnya Termohon mengembalikan persyaratan tersebut kepada yang bersangkutan pada saat penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan ijazah pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) yang dimiliki H. Burhan Saragih sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalil positanya mengemukakan setelah adanya pernyataan dan pengumuman yang dibuat oleh Termohon *a quo* secara sistimatis (mulai dari paska penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon) dan Terstruktur (dengan melibatkan seluruh penyelenggara pemilukada), pemilih menjadi tidak simpatik dan ragu-ragu terhadap keabsahan dan legalitas Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai

pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Akibatnya, Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sangat dirugikan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Termohon *a quo* dan hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Kota Pematangsiantar 2010;

15. Bahwa atas dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas, Termohon tegaskan dalil-dalil posita Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan sarat dengan asumsi yang mencoba memprovokasi Mahkamah seolah-olah Termohon telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Untuk itu perlu Termohon terangkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2010 berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010, Termohon telah menetapkan 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 9 April 2010 Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang antara lain sebagai berikut (**Bukti T-5 dan Bukti T-6**):

NO. URUT	CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PEMATANGSIANTAR
1.	Ir. MARHUM SIPAYUNG, M.Si. - H. EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos.
2.	Ir. ROBERT EDISON SIAHAAN - H. BURHAN SARAGIH, S.H.
3.	Prof. Dr. POLTAK SINAGA, M.Si. - Drs. JALAEI SARAGIH
4.	HEROHWIN T.F. SINAGA AP., M.Si. - Hj. FRIDA RIANI DAMANIK
5.	DR. RIA NOVIDA TELAUMBANUA, M.Kes. - Drs. SURYATNO
6.	MOH. HERIZA SYAHPUTRA, S.H. – HORAS SILITONGA
7.	HULMAN SITORUS, S.E. - Drs. KONI ISMAIL SIREGAR
8.	Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M. Kes. - RUPINA ARUAN, S.Pd.
9.	FRANS IMMUEL T. SARAGIH, S.Sos. - Dra. ROKIBAH HASIBUAN, M.A.
10.	BARKAT SYAH - Ir. BOUNDETH DAMANIK

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 43 PP Nomor 6 Tahun 2005, Termohon juga telah melakukan penelitian kelengkapan dan administrasi pencalonan atas kesepuluh Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan atas hasil penelitian tersebut telah diumumkan oleh Termohon baik melalui surat pada partai pendukung masing-masing Pasangan Calon, juga terhadap masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar melalui jajaran KPU Kota Pematangsiantar serta melalui media massa dan elektronik Kota Pematangsiantar. Setelah dilakukannya pengumuman oleh Termohon atas penelitian tersebut, ternyata tidak ada sanggahan berupa keberatan baik dari partai pendukung masing-masing Pasangan Calon maupun masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar hingga jangka waktu 14 (empat belas) hari;
3. Bahwa setelah Termohon menetapkan 10 (sepuluh) Pasangan Calon dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, Termohon juga mengumumkan kepada masyarakat Pemilih Kota Pematangsiantar baik melalui media cetak maupun elektronik. Terhitung sejak pengumuman yang dilakukan oleh Termohon mengenai 10 (sepuluh) Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, juga sama sekali tidak ada keberatan di antara sesama peserta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon. Begitu juga halnya dengan masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar, sama sekali tidak ada yang memberikan sanggahan atau keberatan terkait identitas masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 April 2010;
4. Bahwa seandainya ada masukan ataupun sanggahan dari masyarakat terhadap hasil penelitian kelengkapan administratif masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005, sebelum penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan diproses dan ditindaklanjuti oleh

Termohon, namun fakta-faktanya sama sekali tidak ada, khususnya dari partai pendukung masing-masing Pasangan Calon;

5. Bahwa terkait dengan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2006 *juncto* Ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat. Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sesuai ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tidak dapat diubah lagi oleh Termohon;
6. Bahwa terkait dengan ijazah Burhan Saragih (ic. Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 2), alasan Pemohon bahwa Termohon hanya melakukan pengumuman dengan Surat Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 yang isinya menguraikan tentang gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang terdapat pada identitas H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 2) pada seluruh dokumen Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dinyatakan dan dianggap tidak ada dan pengumuman melalui PPK, PPS, dan KPPS serta ditempatkan di TPS-TPS di Kota Pematangsiantar, dan memuat pengumuman tersebut di Harian Siantar 24 Jam terbitan Selasa, 8 Juni 2010 dan di Harian Metro Siantar terbitan Rabu 9 Juni 2010, karena diduga ijazah palsu yang tentunya tindakan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan tetap berpegang pada beberapa asas-asas kejujuran dan keadilan tanpa menimbulkan kerugian pada pasangan calon lain, dan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat, yang tentunya akan melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku bilamana hal ini dilakukan oleh Termohon (**Bukti T-4**);
7. Bahwa seharusnya dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada permohonan keberatannya, justru Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan tindakan pelanggaran yang dikualifisir sebagai tindakan tidak patut yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang calon Wakil Kepala

Daerah dimana Pemohon (ic. Burhan Saragih) mengajukan riwayat pendidikan Perguruan Tinggi Amir Hamzah yang ternyata dipastikan tidak benar setelah dilakukan verifikasi pendidikan kembali oleh KPU Kota Pematangsiantar karena Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar meminta agar KPU untuk meneruskan laporan sesuai dengan Surat Panwaslukada Nomor 270-iii/Panwaslukada-PS/VI/2010 tertanggal 8 Juni 2010, walaupun telah dilakukan penetapan oleh Termohon pada 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 pada tanggal 8 April 2010. Hal yang sangat disayangkan oleh Termohon adalah terlambatnya jawaban klarifikasi dari Universitas Amir Hamzah yang beralamat kampus di Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Telp/Fax (061) 6614160, atas gelar kesarjanaan (S-1) Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 2), dimana diterima oleh Termohon Surat Klarifikasi tersebut pada tanggal 27 Mei 2010 dengan Nomor 114 A/BAAK-Unham/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor T.M. Adriansyah, S.E. yang isinya menyatakan bahwa Saudara H. Burhan Saragih, S.H. tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan oleh sebab itu maka ijazah sarjana atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah;

8. Bahwa surat klarifikasi dari Universitas Amir Hamzah yang beralamat kampus Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Telp/Fax (061) 6614160 yang diterima Termohon pada tanggal 27 Mei 2010 dengan Surat Nomor 114A/BAAK-Unham/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor T.M. Adriansyah, S.E. yang isinya menyatakan bahwa Saudara H. Burhan Saragih, S.H. tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, sangat tidak sesuai dengan surat yang diserahkan sendiri oleh Saudara Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada Termohon pada tanggal 24 Mei 2010 yang isinya menyatakan bahwa Burhan Saragih, tempat/tanggal lahir

Pematang Raja, 5 Januari 1955, NIRM/Nomor Pokok Mahasiswa: 861476000065/861065, Fakultas Hukum Program Studi Hukum Keperdataan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Keperdataan, Universitas Amir Hamzah Medan sejak tahun ajaran 1986/1987 dan menyelesaikan perkuliahan pada tahun ajaran 1995/1996 dengan memperoleh Transkrip Nilai dan Ijazah yang ditandatangani oleh Rektor dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah I (Surat Keterangan Aktif dan Rekomendasi Belajar 4/No.A 15/71.FH-UNHAM/IV/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Rektor Tarmizi, S.H., M.Hum. (**Bukti T-7**);

9. Bahwa selanjutnya untuk memperoleh data yang lebih valid lagi, Termohon kembali melakukan klarifikasi lanjutan pada tanggal 30 Mei 2010 dengan Surat Nomor 270/1673/KPU-PS/V/2010 tertanggal 30 Mei 2010 dan berdasarkan Surat Universitas Amir Hamzah Nomor 161/BAAK-Unham/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan Universitas T.M. Adriansyah a.n. Rektor kembali menegaskan bahwa Sdr. Burhan Saragih tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah. Oleh karena itu, Ijazah atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah dan surat keterangan aktif dan rekomendasi belajar Nomor 415/71.FH-Unham/IV/2010 tanggal 21 Mei 2010 tidak pernah diterbitkan (**Bukti T-8**);
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2010 KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) menerima Surat Kopertis Wilayah I Medan dengan Surat Nomor 049/L.1.3.1/AK/2010 tertanggal 3 Juni 2010 menyatakan bahwa nama Burhan Saragih tidak terdaftar pada buku NIRM Kopertis Wilayah I. Selanjutnya, NIRM, NIM dan NIRL yang tertera pada fotokopi ijazah Burhan Saragih adalah bukan data-data yang bersangkutan melainkan data-data orang lain (**Bukti T-9**);
11. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum tersebut, terlihat nyata bahwa Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sendirilah yang sesungguhnya melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bersifat

sistimatis dan massif dalam proses Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan atas tindakan pelanggaran ini telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Panwaslukada Kota Pematangsiantar untuk diteruskan sebagai tindak lanjut atas Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar Nomor 08/KL/Panwaslukada-PS/VI/ 2010 tertanggal 07 Juni 2010. Apalagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon *incumbent* (ic. Ir. RE Siahaan) yang seharusnya menunjukkan sikap pemimpin yang bersih dan jujur, serta Termohon berdasarkan Surat tertanggal 270/1797/KPU-PS/VI/2010 tentang Penelusuran Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Pematangsiantar dan atas dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Sdr. Burhan Saragih telah dilaporkan ke Panwaslukada Kota Pematangsiantar dan Polresta Pematangsiantar melalui Surat Nomor 720/1750/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010. Artinya sangat jelas dan terang bahwa Termohon selaku penyelenggara sama sekali tidak menutup mata atas pelanggaran Pemilukada yang diduga dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon yang diketahui Termohon (**Bukti T-10**) ;

12. Bahwa selanjutnya alasan-alasan Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 6 Juni 2010 adalah agar masyarakat Pemilih Kota Pematangsiantar dapat lebih jelas mengetahui identitas para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar. Selain itu Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tentunya harus bersikap adil dan setara pada seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar yang lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 yang isinya KPU selaku penyelenggara pemilihan berkewajiban memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf f PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Termohon selaku penyelenggara berkewajiban melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, sehingga adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila Termohon memenuhi permintaan masyarakat untuk melakukan pencoretan

atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimasa tenang karena sarat dengan resistensi keamanan dan suasana kondusif menjelang pemungutan suara tanggal 9 Juni 2010. Apalagi syarat minimal pendidikan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan/atau sederajat masih memenuhi untuk ikut dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

13. Bahwa apabila dilakukan pencoretan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana rekomendasi Panwaslukada Kota Pematangsiantar maupun beberapa kelompok masyarakat, hal tersebut sangat tidak mungkin Termohon lakukan oleh karena tidak mungkin mencetak surat suara ulang karena surat suara sudah dicetak dan waktu pencoblosan tinggal 2 hari terhitung tanggal Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar Nomor 08/KL/Panwaslukada-PS/VI/2010 tertanggal 07 Juni 2010;
14. Bahwa terkait dalil posita Pemohon agar Termohon mengembalikan persyaratan gelar kesarjanaan H. Burhan Saragih apabila diragukan keabsahannya dan menetapkan ijazah pendidikan SLTA yang dimiliki oleh H. Burhan Saragih, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 adalah suatu hal yang sangat tidak mendasar dan sangat tidak memiliki korelasi hukum sama sekali, sebab sesuai dengan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana penetapan tersebut telah bersifat final dan mengikat. Agar tidak timbul gejolak dari masyarakat pemilih menjelang hari pemungutan suara tanggal 9 Juni 2010 maka Termohon mengambil jalan tengah dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 05 Juni 2010;
15. Bahwa walaupun Pemohon (ic. Burhan Saragih) telah nyata-nyata menyertakan ijazah Perguruan Tinggi yang diduga tidak benar tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2) masih berhak mengikuti Pemilukada Kota Pematangsiantar karena menurut Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf c Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Pemohon (ic. Burhan Saragih) masih dapat mengikuti Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan bahkan berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, perolehan suara Pemohon mencapai 31.489 suara sah. Artinya pengumuman yang dilakukan oleh Termohon sama sekali tidak mengurangi antusias masyarakat pemilih di Kota Pematangsiantar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga dalil-dalil Pemohon yang mengemukakan pemilih menjadi tidak simpati dan ragu-ragu serta memengaruhi perolehan suara Pemohon adalah dalil yang sangat tidak relevan dan tidak memiliki korelasi sama sekali, sebab seandainya pun pengumuman tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, Pemohon belum bisa memastikan akan memperoleh suara lebih banyak dari pasangan calon lain dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 karena masih ada 9 (sembilan) pasangan calon lain yang memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut sangat bersifat asumsi dan sangat tidak berdasar;

16. Bahwa adalah bersifat asumtif dan tidak berdasar hukum sama sekali terkait dalil-dalil posita Pemohon, dimana Pemohon pada dalil-dalil permohonannya mengemukakan Termohon tidak pernah melakukan penelitian dan klarifikasi kepada instansi terkait mengenai keabsahan persyaratan administrasi pendidikan Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 7). Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana intinya dalam dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengemukakan adanya kejanggalan dalam riwayat Pendidikan Hulman Sitorus, khususnya ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Perguruan Tinggi yang menunjukkan bahwa dokumen yang dipergunakan oleh Hulman Sitorus pada saat pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar sangat diragukan keabsahannya, dengan alasan-alasan posita Pemohon sebagai berikut :

1. Terhadap Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 4 RK Pematangsiantar dan yang dipergunakan oleh Hulman Sitorus sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pada saat pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, setelah diteliti kebenarannya oleh Pemohon ternyata Nomor Induk 214 ternyata bukan atas nama Hulman Sitorus melainkan atas nama Riana Naibaho;
2. Bahwa selanjutnya terhadap ijazah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Bumiputera Pematangsiantar, dimana ditemukan kejanggalan oleh Pemohon masa pendidikan SLTP/SMP Hulman Sitorus adalah selama 2 (dua) tahun, karena ijazah SLTP tahun 1970 dan tahun penerbitan ijazah SD tahun 1968 serta selanjutnya Pemohon dalam dalil positifnya juga mengemukakan ijazah SMP Hulman Sitorus diterbitkan di Medan sementara yang bersangkutan sekolah di Pematangsiantar. Kemudian dalam dalil positifnya, Pemohon menuduh Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap keabsahan syarat administrasi pendidikan Hulman Sitorus yang artinya Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa terhadap dalil-dalil positif Pemohon adalah tidak benar dan tidak didukung oleh data-data serta fakta hukum yang sebenarnya, sebab Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pematangsiantar khususnya penelitian dan klarifikasi atas data-data persyaratan administrasi ijazah pendidikan setiap jenjang dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi pada setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Bahwa ijazah Hulman Sitorus saat mendaftar ke KPU Kota Pematangsiantar terkait ijazah SD setelah diklarifikasi oleh Termohon adalah memang terdaftar di Sekolah Dasar (SD) RK 4, Jalan Pantai Timur, Kelurahan Siopat Suhu,

Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar dan hal ini telah di sampaikan oleh Kepala SD RK 4, Sr Fidelis br Manalu, S.Pd. pada Termohon, bahkan sesuai data milik sekolah, berdasarkan Buku Induk Agustus 1965, Hulman Sitorus bersekolah di SD RK 4 Wilayah Kota Madya Siantar II dan terdaftar di kelas V tahun 1967 dengan Nomor Induk 214 dan dari sekolah inilah Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Walikota Kota Pematang Siantar Nomor Urut 7) memperoleh ijazah SD dan ijazah tersebut ditandatangani oleh Afdon Silalahi sebagai Kepala Sekolah pada saat itu, dan disahkan oleh Pemilik Sekolah Wilayah Kota Madya Pematangsiantar II, BM. Saragih. Artinya, Nomor Induk 214 adalah benar-benar atas nama Hulman Sitorus bukan atas nama Riana Naibaho (**Bukti T-11**)

19. Bahwa selanjutnya terkait ijazah SMP Hulman Sitorus tersebut berdasarkan data-data yang diserahkan kepada Termohon terlihat telah dilegalisir Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang ditandatangani oleh Sekretaris Hotma Aritonang. Terkait dengan masa pendidikan yang dijalani oleh Hulman Sitorus hanya dua tahun, saat di konfirmasi oleh Termohon pada instansi terkait diperoleh data dan klarifikasi bahwa saat kelas 1 dan kelas 2, Pasangan Calon Nomor Urut 7 benar bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar dan selanjutnya dipindahkan orang tuanya ke kelas III dengan mendaftarkan di SMP Bumiputera dan bersekolah 2 (dua) kali dalam satu hari oleh karena pada masa itu bisa bersekolah dua kali dalam satu hari serta Hulman Sitorus lolos testing untuk diterima di kelas tiga (**Bukti T-12**);
20. Bahwa selanjutnya berdasarkan data-data ijazah pendidikan yang diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 pada Termohon telah dileges oleh Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon sangat patut untuk di tolak atau dikesampingkan;
21. Bahwa selanjutnya terbukti dalam penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 serta penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Pematangsiantar Tahun 2010 tersebut seluruh pasangan calon tidak ada yang merasa keberatan atas surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut. Artinya, tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, khususnya oleh Pemohon atas ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebagai salah satu peserta Pasangan Calon Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

22. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil posita yang dikemukakan oleh Pemohon pada dalil-dalil positanya, sesungguhnya Termohon telah meminta Drs. Koni Ismail Siregar selaku Pasangan Calon Nomor Urut 7 untuk mematuhi Undang-Undang dengan mengajukan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), namun Walikota Pematangsiantar tidak menerbitkan persetujuannya sehingga Termohon mengambil kebijakan dengan berdasar aturan konstitusi yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I UUD 1945 yang menyebutkan:

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:** *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".*

**Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:** *"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:** *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

Berpijak pada ketentuan UUD 1945 tersebut maka Termohon menganggap surat pengunduran diri dari Drs. Koni Ismail Siregar (**Bukti T-13**) selaku Pasangan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 7 telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *unctis* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;

23. Bahwa oleh karena itu pencalonan Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;

24. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta tersebut di atas maka dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak didasari oleh data-data dan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga adalah patut secara hukum bila seluruh dalil-dalil posita Pemohon dikesampingkan dan tidak patut untuk ditanggapi secara hukum, apalagi dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum pada permohonan dari Pemohon sama sekali tidak terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana disebutkan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
25. Bahwa selanjutnya agar lebih jelas dan terang benderang, Termohon selaku penyelenggara telah melakukan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota PematangSiantar Tahun 2010:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA
1.	Ir. MARHUM SIPAYUNG, M.Si. dan H. EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos.	12.188	10,21 %
2.	Ir. ROBERT EDISON SIAHAAN dan H. BURHAN SARAGIH, S.H.	31.489	26,40 %
3.	Prof. Dr. POLTAK SINAGA, M.Si. dan Drs. JALAEEL SARAGIH	943	0,8 %

4.	HEROHWIN T.F. SINAGA, AP. MSi dan Hj. FRIDA RIANI DAMANIK	4.269	3,58 %
5.	DR. RIA NOVIDA TELAUMBANUA, M.Kes. dan Drs. SURYATNO	3.981	3,34 %
6.	MOH. HERIZA SYAHPUTRA, S.H. dan HORAS SILITONGA	13.804	11,57 %
7.	HULMAN SITORUS, S.E. dan Drs. KONI ISMAIL SIREGAR	39.585	33,18 %
8.	Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes. dan RUPINA ARUAN, S.Pd.	476	0,40 %
9.	FRANS IMMNUEL T. SARAGIH, S.Sos. dan Dra. ROKIBAH HASIBUAN, M.A.	432	0,36 %
10	BARKAT SYAH dan Ir. BOUNDETH DAMANIK	12.118	10,16 %
	<b>J U M L A H</b>	<b>119.285</b>	<b>100%</b>

26. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran adalah asumsi dari Pemohon semata yang sama sekali tidak didasari oleh fakta-fakta hukum yang sebenarnya, karena proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan taat pada asas-asas sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, serta Termohon telah memperlakukan dan menempatkan setiap Pasangan Calon secara adil dan tidak berpihak serta akhirnya pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dapat berjalan aman, tertib, kondusif, dan sukses;
27. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon mengenai pernyataan Termohon di beberapa media cetak tentang gelar kesarjanaan H. Burhan Saragih serta pengumuman yang ditempelkan di seluruh TPS oleh Termohon adalah sebagaimana Termohon uraikan pada butir di atas, tidak lain dari tujuan melaksanakan Pemilukada di Kota Pematangsiantar gar dapat terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Kota Pematangsiantar serta berlangsung secara aman dan kondusif sesuai dengan

asas-asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, khususnya asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, sehingga masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar lebih mengenali identitas para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 secara terang benderang sehingga tidak ada tuduhan terhadap Termohon telah menciderai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan KPU Kota Pematang Siantar (ic. Termohon) tidak terkesan menutupi permasalahan yang muncul setelah penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

28. Bahwa adalah tidak benar terkait dalil-dalil posita Pemohon terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang sejak awal telah dilakukan oleh Termohon karena tidak melakukan penelitian dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 7, sehingga memberikan keuntungan pada salah satu Pasangan Calon tertentu (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 7) dan mengakibatkan kerugian pada Pemohon, sebab dalil-dalil posita Pemohon tidak memiliki dasar dan korelasi hukum sama sekali dan cenderung dalil-dalil posita Pemohon lebih bersifat provokatif dan mengada-ada, karena Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon ada 10 (sepuluh) Pasangan Calon dan memperoleh perlakuan yang setara erta adil oleh Termohon sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Bahwa selain data-data dan fakta-fakta hukum yang teruarai di atas, keseluruhan dalil-dalil posita Pemohon dikualifisir masuk dalam koridor atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dan wewenang Panwaslukada Kota Pematangsiantar dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 110 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

30. Bahwa di samping itu, terkait dalil posita Pemohon adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 beserta Tim Kampanyenya tanggal 9 Juni 2010 atau sebelum pemilih melakukan pemungutan suara di TPS, yaitu dengan memberikan *voucher* dengan nilai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT sehingga memengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7, seandainya (*quad non*) benar terjadi demikian, Termohon sangat menyesalkan peristiwa tersebut dan persoalan ini menurut Termohon merupakan peristiwa pelanggaran Pemilukada yang merupakan wewenang Panwaslukada Kota Pematangsiantar [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum]. Apabila Panwaslukada Kota Pematangsiantar menemukan unsur pidana maka sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada akan diteruskan pada pihak yang berwenang sehingga jelas persoalan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kota Pematangsiantar dan bukan masuk wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 1 angka 8, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
31. Bahwa terkait dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon agar dilakukan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan dilakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 adalah dalil-dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena alasan-alasan pemungutan suara ulang di TPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan secara jelas dan terang bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
32. Bahwa dalil-dalil yang didasari oleh asumsi-asumsi semata dari Pemohon adalah merupakan pencideraan atas pengakuan terhadap suara rakyat yang telah menggunakan hak pilih guna memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan terlihat nyata secara jelas dan terang dalil-dalil Pemohon baik posita maupun petitumnya hanya semata-mata mengandung wujud kekecewaan atas kekalahan dan sangat tidak siap atas kekalahan yang diterima tersebut, walaupun pelaksanaan Pemilukada di Kota Pematangsiantar telah berjalan secara sukses dan aman, serta demokratis sehingga sama sekali tidak tercipta kerusuhan massal yang berefek pada pengrusakan seperti daerah lainnya. Artinya masyarakat pemilih di Kota Pematangsiantar sangat dewasa menerima hasil Pemilukada Tahun 2010 yang telah dilaksanakan sesuai nilai-nilai demokrasi yang diamanatkan dan diatur dalam Konstitusi kita;
33. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil posita Pemohon adalah dalil-dalil yang sangat tidak benar dan tidak berdasar sama sekali sebagaimana telah Termohon uraikan. Pemohon dalam menuduh Termohon dengan tuduhan melakukan pelanggaran secara massif, terorganisir, dan sistimatis sama sekali tidak relevan dengan data-data dan fakta hukum yang sebenarnya, karena proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah

berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap berpegang pada asas-asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ;

34. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010, dimana dalam pertimbangan pada putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah *berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota*, dan bahwa pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

**Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008:** *“Keberatan sebagaimana berkenaan dengan ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*

**Pasal 4 PMK 15/2008:** *“Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*

**Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008:**

*Ayat 2 huruf:*

a. ....

b. *Uraian yang jelas mengenai:*

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

35. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonannya adalah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi dan merupakan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilukada Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;
36. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terurai di atas, serta dalil-dalil posita yang dipaparkan oleh Pemohon hanya-semata-mata berangkat dari asumsi-asumsi terkait pelanggaran administratif pada proses tahapan yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum maka sudah selayaknya dan patut secara hukum seluruh dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Permohonan Keberatan dari Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan klijke verklaard*);
37. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas maka dengan ini Termohon memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon atau menyatakan setidaknya permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijkeverklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dan dikemukakan tersebut di atas maka Termohon mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

- Menerima dalil-dalil eksepsi Termohon seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Termohon seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
  - b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
  - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

- b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
- c. Berita Acara Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menerima hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

8. Memerintahkan Pemohon untuk mentaati dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/128/KPU-PS/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Tepi Indonesia Nomor 008/TePI-PS/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/177/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 31 Maret 2010;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 8 April 2010;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 9 April 2010;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat Keterangan Aktif dan Rekomendasi Belajar Nomor 415/71.FH-UNAM/IV/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah

dan ditandatangani oleh Tarmizi, SH., M.H.;

8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat Nomor 114A/BAAK-Unham/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah dan ditandatangani oleh T.M. Adriansyah;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1674/KPU-PS/V/2010 tertanggal 30 Mei 2010 perihal Klarifikasi Ijazah;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1750/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010 perihal Klarifikasi Ijazah;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 083/E.14/SD-CR4/ST/IV/2010 tertanggal 10 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yoseph Medan SD Swasta RK Nomor 04 yang ditandatangani oleh SR. Fidelis Manalu, S.Pd.;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Ijazah SMTP Hulman Sitorus Nomor LPA047494 yang diterbitkan oleh SMTP Bumiputra tertanggal 21 Nopember 1970 yang dilegalisir oleh Hotma Aritonang atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah (Blanko model B 6 A – KWK) atas nama Drs. Koni Ismail Siregar tertanggal 01 Maret 2010;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Surat Nomor 270/1028/KPU-PS/2010 tertanggal 5 Maret 2010 tentang Klarifikasi Ijazah atas nama Sdr. Burhan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 di Medan;

15. Bukti T – 15 : Fotokopi Surat Nomor 270/1503/KPU-PS/2010 tertanggal 19 Mei 2010 tentang Klarifikasi Ijazah atas nama Sdr. Burhan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kp. Bulian Seri Rampah;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Surat Nomor 270/1632/KPU-PS/2010 tertanggal 25 Mei 2010 tentang Klarifikasi Ijazah atas nama Sdr. Burhan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 162107 Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Surat Nomor 270/1633/KPU-PS/2010 tertanggal 25 Mei 2010 tentang Klarifikasi Ijazah atas nama Sdr. Burhan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Surat Nomor 270/1722/KPU-PS/2010 tertanggal 2 Juni 2010 tentang Mohon Petunjuk dan Pertimbangan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Naskah Kesepakatan Bersama Pemilukada dan Kampanye Damai Siap Kalah Menang pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Kliping Berita Online Sumut Cyber Media yang berjudul "Ijazah Hulman terdaftar di SD RK 4" tertanggal 19 Juni 2010;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Kliping Berita Online MedanPunya.com yang berjudul "KPU Siantar Tetapkan 10 Pasangan Calon Walikota" tertanggal 9 April 2010 Pukul 11.23 WIB;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tanggal 3 Desember 2009

tentang Kode Etik Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

23. Bukti T – 23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/23/KEP/KPU-PS/I/2010 tentang Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau pada Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat TePI Indonesia Nomor 007/TePI-PS/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 perihal Surat Pengantar Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pematangsiantar 2010;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1723/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 3 Juni 2010 kepada Komite Pemilih Indonesia (TePI) Kota Pematangsiantar;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Sitalasari (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Utara (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;

29. Bukti T – 29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Timur (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marimbun (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
34. Bukti T – 34 : Fotokopi Kliping Berita Digital Cyber Zone tanggal 19 Maret 2010 dengan judul “Izin Atasan Bukan Syarat Mutlak” sebagai penjelasan Anggota KPU Pusat Abdul Azis;
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Kliping Berita Digital SumutPos.com tanggal 23 Maret 2010 dengan judul berita “Mendagri: Izin Atasan

Boleh Diabaikan” sebagai penjelasan Anggota KPU Pusat Abdul Azis;

36. Bukti T – 36 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK-KPU-PS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar tertanggal 9 April 2010;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba tertanggal 8 April 2010;
38. Bukti T – 38 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Timur tertanggal 8 April 2010;
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat tertanggal 8 April 2010;
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 8 April 2010;
41. Bukti T – 41 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marimbun tertanggal 8 April 2010;
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat tertanggal 8 April 2010;
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Sitalasari tertanggal 8 April 2010;

44. Bukti T – 44 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Utara tertanggal 8 April 2010;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Terpilih Nomor Urut 7, yaitu Hulman Sitorus, S.E., dan Drs. Koni Ismail Siregar, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2010, dengan uraian sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Permohonan Pemohon Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Daluwarsa)**

1. Bahwa Pihak Terkait (ic. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 7) menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil posita permohonannya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh masing-masing para Pasangan Calon adalah pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara tegas dan jelas disebutkan:

Ayat (1) : *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan”*

Ayat (2) : “Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi”.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan data dan fakta hukum pada Selasa tanggal 15 Juni 2010, KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang **Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010**;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tenggat waktu pengajuan permohonan pembatalan paling lambat 3 (tiga) hari, yaitu terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010, bukan pada hari Senin tanggal 21 juni 2010 sebagaimana asumsi dari Pemohon dalam pengajuan permohonan keberatannya. Dengan demikian, apabila dilihat jadwal pendaftaran permohonan yang dimajukan oleh Pemohon, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 maka berdasarkan jadwal pengajuan permohonan Pemohon pada hari Senin tanggal 21 juni 2010 serta merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pengajuan keberatan Pemohon telah melewati batas waktu (daluwarsa) yang ditentukan (*vide* Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 21 Juni 2010);
6. Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum tersebut maka Pihak Terkait memohon pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

**B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam Jawaban ini;

2. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi :
  - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 sehingga berdasarkan hal ini dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon pada permohonannya tidak jelas dan kabur maka Pihak Terkait memohon pada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

**C. Materi Keberatan Pemohon di luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sampai dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun hanya terkait pada persoalan pendidikan gelar kesarjanaan H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil Walikota Pematangsiantar), keabsahan persyaratan administrasi pendidikan SLTP Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 7), dan surat pengunduran diri Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang merupakan koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah

sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang secara Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kota Pematangsiantar [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005];

2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk sengketa hasil Pemilukada melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi kelengkapan pendidikan para Pasangan Calon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
4. Bahwa hal tersebut didasari data dan fakta saat ditetapkannya 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, yang sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing pasangan calon maupun partai pendukungnya,

sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Pematangsiantar 2010 telah berjalan secara tertib, aman dan kondusif, serta masyarakat Kota Pematangsiantar dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;

5. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain berkisar ijazah kesarjanaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Calon Wakil Walikota) serta Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 maka sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

#### **D. Objek Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)**

1. Bahwa dalil posita Pemohon dalam pokok permohonan maupun dalam permohonan keberatan atas hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun pada petitumnya, Pemohon hanya menyebutkan Berita Acara Pleno Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang selanjutnya telah diubah dengan Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tentang perubahan terhadap Keputusan Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010

tanggal 16 Juni 2010; yang intinya seharusnya Pemohon mengajukan permohonan terhadap objek **Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010**, sehingga sudah sepatutnya menurut ketentuan hukum, permohonan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) (*vide* Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

2. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) maka Pihak Terkait memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil posita Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil-dalil keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

#### **E. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan**

1. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
2. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing pasangan calon maka berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada proses administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan Pasal 51 ayat 5 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, sehingga secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi PemiluKada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);
4. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya-tidaknya permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui dalam perkara ini;
3. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PemiluKada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010

tertanggal 8 April 2010 (**Bukti PT-1**) dan Rapat Pleno Terbuka Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 09 April 2010, KPU Kota Pematangsiantar menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematang Siantar Tahun 2010 (**Bukti PT-2**) sebagaimana tabel di bawah ini;

NO. URUT	CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PEMATANGSIANTAR
1.	Ir. MARHUM SIPAYUNG, M.Si. - H. EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos.
2.	Ir. ROBERT EDISON SIAHAAN – H. BURHAN SARAGIH, S.H.
3.	Prof. Dr. POLTAK SINAGA, M.Si. - Drs. JALAEEL SARAGIH
4.	HEROHWIN T.F. SINAGA AP., M.Si. - Hj. FRIDA RIANI DAMANIK
5.	DR. RIA NOVIDA TELAUMBANUA, M.Kes. - Drs. SURYATNO
6.	MOH. HERIZA SYAHPUTRA, S.H. – HORAS SILITONGA
7.	HULMAN SITORUS, S.E. - Drs. KONI ISMAIL SIREGAR
8.	Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M. Kes. - RUPINA ARUAN, S.Pd.
9.	FRANS IMMUEL T. SARAGIH, S.Sos. - Dra. ROKIBAH HASIBUAN, M.A.
10.	BARKAT SYAH - Ir. BOUNDETH DAMANIK

4. Bahwa selanjutnya KPU Kota Pematangsiantar mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2010 sesuai Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2010 (**Bukti PT-3**);
5. Bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 2010, Pemohon telah membacakan permohonan keberatannya, dimana Pemohon pada intinya merasa keberatan atas:
  - Proses verifikasi dan penelitian terhadap masalah ijazah Pihak Terkait (ijazah SD dan SMP atas nama Hulman Sitorus, S.E.) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar

Tahun 2010 tidak dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar dan dianggap ijazah Pihak Terkait tidak benar;

- Proses Verifikasi dan Penelitian KPU Kota Pematangsiantar terhadap calon Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Pihak Terkait (ic. Drs. Koni Ismail Siregar) sebagaimana didalilkan Pemohon dalam dalil positifnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2010;
- Perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar sehingga memberikan keuntungan pada Pihak Terkait (ic. Pasangan calon Nomor Urut 7);
- Adanya *money politik* yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tujuan membeli suara pemilih agar pemilih memilih pasangan calon Pihak Terkait;
- Adanya kecurangan massif, terorganisir, dan sistimatis terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan:

Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada;

Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu.

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Sengketa dalam perkara Register Nomor 61,62,63/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

7. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan atau dikaitkan dengan kedudukan maupun kepentingan hukum Pihak Terkait semata, namun tidak menutup kemungkinan bagi Pihak Terkait untuk juga memberikan tanggapan yang dialamatkan kepada Termohon dalam hal ini KPU Kota Pematangsiantar;

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata ketiga-tiga pasangan calon (ic. Para Pemohon) yang mengajukan permohonan keberatan pada Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (ic. KPU Kota Pematangsiantar) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010, sehingga sangat patut ditegaskan dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;
9. Bahwa selain dari pada itu secara umum permohonan keberatan Pemohon dalam permohonan keberatannya juga tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena terkait dengan ranah proses tahapan penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan yang sifatnya sudah bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005, dan selanjutnya proses penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon (ic. KPU Kota Pematangsiantar) terhadap seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dijalankan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini terlihat setelah penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 pada tanggal 8 Maret 2010, seluruh Pasangan Calon dan masyarakat pemilih tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan Terhadap KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon), begitu juga perlakuan Termohon terhadap seluruh Pasangan Calon juga dilakukan secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005;
10. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya dapat dicermati bahwa Pemohon telah telah nyata-nyata keliru di dalam:
  - a. Mencermati fakta hukum, b. memahami hukum, c. menerapkan hukum, dan d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini Termohon tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi

penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, serta juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Hulman Sitorus, S.E., dan Drs. Koni Ismail Siregar;
12. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum oleh karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 pada tanggal 9 Juni 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar, penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
13. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini perlu Termohon tegaskan pada Pemohon agar jangan terlampau terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata massif, terstruktur, dan sistimatis, karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu **Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-**

**PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010** (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 4, dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);

14. Bahwa bilamana pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon maka yang lebih berpotensi untuk melakukan tindakan pelanggaran massif, sistimatis dan terstruktur, sebab secara logika hukumnya lebih berpotensi Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) selaku pasangan *incumbent*, karena masih memiliki pengaruh kuat pada jajaran eksekutif di tingkat Pemko Pematangsiantar, sehingga adalah suatu yang sangat tidak berdasar dalil tuduhan dari Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalil-dalil posita Pemohon hanya dalil-dalil yang didasari asumsi semata;
15. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam proses penelitian, klarifikasi, dan verifikasi, menurut Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang hanya bersifat asumsi semata dari Pemohon (*ic.* Pasangan Calon Nomor urut 6), apalagi dalil posita Pemohon tersebut merujuk pada Surat Asosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat No. C.32/LSM-APPI/SS/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal KPUD Pematangsiantar tidak Profesional/Selektif terhadap ijazah SD dan SMP Sdr. Hulman Sitorus, S.E. yang mana kedudukan hukum dari LSM yang bersangkutan terkait Pemilukada Kota Pematangsiantar tahun 2010 yang ternyata tidak terdaftar sebagai salah satu pemantau dalam pelaksanaan

Pemilukada di Kota Pematangsiantar tahun 2010 yang memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota Pematangsiantar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 117 ayat 2 PP Nomor 5 tahun 2005 (**Bukti PT-4**);

16. Bahwa oleh karena berdasarkan data-data dan fakta yang ada bahwa Asosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia tidak terdaftar di kantor Termohon maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil posita dari Pemohon sangat patut untuk ditolak karena bersumber dari LSM yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2005 dan juga terungkap dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang bersumber dari LSM yang sama sekali tidak terdaftar di kantor KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) serta tidak menjalankan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 119 PP Nomor 6 Tahun 2005;
17. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah dijalankan Termohon sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;
18. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah mengikuti segala tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar, mulai tahap pencalonan, tahap kampanye, sampai dengan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, dimana Pihak Terkait melihat telah sesuai dengan asas demokrasi serta ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU maupun KPU Kota Pematangsiantar yang berjalan secara konsisten dan bertanggung jawab dengan perlakuan yang adil dan setara dari Termohon;
19. Bahwa selain daripada itu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP Nomor 6 Tahun 2005, Pihak Terkait juga menyaksikan Termohon telah melakukan penelitian kelengkapan dan administrasi pencalonan atas kesepuluh pasangan

calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan atas hasil penelitian tersebut telah diumumkan oleh Termohon baik melalui surat pada partai pendukung masing-masing pasangan calon, juga terhadap masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar melalui jajaran KPU Kota Pematangsiantar serta melalui media massa dan elektronik Kota Pematangsiantar. Setelah dilakukannya pengumuman oleh Termohon atas penelitian tersebut, ternyata tidak ada sanggahan berupa keberatan baik dari partai pendukung masing-masing Pasangan Calon maupun masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar hingga jangka waktu 14 (empat belas) hari;

20. Bahwa terkait dengan dalil-dalil posita Pemohon dimana pada dalil posita Pemohon dikemukakan Termohon pada tanggal 6 Juni 2010 (pada masa tenang) membuat Pengumuman dengan surat Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 yang isinya menguraikan tentang gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang terdapat pada identitas H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil Walikota Pematang Siantar Nomor Urut 2) pada seluruh dokumen Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dinyatakan dan dianggap tidak ada dan pengumuman yang dibuat oleh Termohon *a quo*, melalui PPK, PPS dan KPPS telah ditempatkan di TPS-TPS di Kota Pematangsiantar, serta juga dikemukakan oleh Pemohon bahwa Termohon juga memuat pengumuman tersebut di Harian Siantar 24 Jam terbitan Selasa, 8 Juni 2010, dan di Harian Metro Siantar terbitan Rabu 9 Juni 2010;
21. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar tersebut adalah tindakan yang tepat dan adil terhadap para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lain oleh karena Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon juga merasa keberatan bila Termohon menutup-nutupi sesuatu atas identitas salah satu Pasangan Calon yang ternyata tidak memiliki kesarjanaan tetapi disebut memiliki gelar kesarjanaan karena tindakan yang menutup-nutupi identitas pendidikan para Pasangan Calon adalah pencideraan atas nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
22. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon dalam dalil positanya mengemukakan setelah adanya pernyataan dan pengumuman yang dibuat oleh Termohon

*a quo* secara sistimatis (mulai dari paska penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon) dan terstruktur (dengan melibatkan seluruh penyelenggara Pemilu), dan pemilih menjadi tidak simpatik dan ragu-ragu terhadap keabsahan dan legalitas Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Akibatnya, Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sangat dirugikan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Termohon *a quo*, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kota Pematangsiantar 2010, merupakan dalil-dalil yang sangat tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh karena para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lain memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 termasuk dalam hal ini Pihak Terkait;

23. Bahwa bila dicermati atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada permohonan keberatannya, menurut Pihak Terkait justru yang melakukan tindakan pelanggaran yang dikualifisir sebagai tindakan tidak patut dengan melakukan beragam cara yang terindikasi pembohongan publik adalah salah satu Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang sejak awal sudah mencoba mengelabui masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar dengan mengajukan riwayat pendidikan Perguruan Tinggi Amir Hamzah yang ternyata dipastikan tidak benar setelah dilakukan verifikasi pendidikan kembali oleh KPU Kota Pematangsiantar;
24. Bahwa hal tersebut terbukti dari jawaban klarifikasi kepada Termohon dari Universitas Amir Hamzah yang beralamat kampus Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Telp/Fax (061) 6614160 atas gelar kesarjanaan (S-1) Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Nomor Urut 2), dimana diterima oleh Termohon Surat klarifikasi tersebut pada tanggal 27 Mei 2010 dengan Nomor 114 A/BAAK-Unham/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor T.M. Adriansyah, S.E., yang isinya menyatakan bahwa Saudara H. Burhan Saragih, S.H. tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan oleh sebab

itu maka ijazah Sarjana atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah;

25. Bahwa Surat klarifikasi Termohon dari Universitas Amir Hamzah yang beralamat kampus Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Telp/Fax (061) 6614160 atas gelar kesarjanaaan (S-1) Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 2) ternyata sangat tidak sesuai dengan surat yang diserahkan sendiri oleh Saudara Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada Termohon pada tanggal 24 Mei 2010 yang isinya menyatakan bahwa Burhan Saragih, tempat/tanggal lahir Pematang Raja, 5 Januari 1955, NIRM/Nomor Pokok Mahasiswa: 861476000065/861065, Fakultas Hukum Program Studi Hukum Keperdataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Keperdataan, Universitas Amir Hamzah Medan sejak tahun ajaran 1986/1987 dan menyelesaikan perkuliahan pada tahun ajaran 1995/1996 dengan memperoleh Transkrip Nilai dan Ijazah yang ditandatangani oleh Rektor dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah I (Surat Keterangan aktif dan Rekomendasi Belajar 4/No.A 15/71.FH-UNHAM/IV/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Rektor Tarmizi, S.H., M.Hum.);
26. Bahwa untuk memperoleh data yang lebih valid lagi KPU Kota Pematangsiantar justru kembali melakukan klarifikasi lanjutan pada tanggal 30 Mei 2010 dengan Surat Nomor 270/1673/KPU-PS/V/2010 tertanggal 30 Mei 2010 dan berdasarkan surat Universitas Amir Hamzah Nomor 161/BAAK-Unham/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan Universitas T.M. Adriansyah a.n. Rektor kembali menegaskan bahwa Sdr. Burhan Saragih tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan oleh karena itu maka ijazah atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah dan surat keterangan aktif dan rekomendasi Belajar Nomor 415/71.FH-Unham/IV/2010 tanggal 21 Mei 2010 tidak pernah diterbitkan;
27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2010 KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) menerima Surat Kopertis Wilayah I Medan dengan Surat Nomor

049/L.1.3.1/AK/2010 tertanggal 3 Juni 2010 yang menyatakan bahwa nama Burhan Saragih tidak terdaftar pada buku NIRM Kopertis Wilayah I. Selanjutnya, NIRM, NIM, dan NIRL yang tertera pada fotokopi ijazah Burhan Saragih adalah bukan data-data yang bersangkutan melainkan data-data orang lain;

28. Bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyertakan gelar kesarjanaan yang diduga palsu pada KPU Kota Pematangsiantar pada saat proses pendaftaran sudah menjadi cermin pada Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon telah mempermainkan proses pelaksanaan PemiluKada yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, apalagi mau menjadi Wakil Kepala Daerah yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi masyarakat bukan memberikan contoh tidak baik dengan gelar kesarjanaan yang diduga palsu;
29. Bahwa Pihak Terkait melihat Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sendirilah yang sesungguhnya melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bersifat sistimatis dan massif dalam proses PemiluKada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan atas tindakan pelanggaran ini telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Panwaslukada Kota Pematangsiantar untuk diteruskan sebagai tindak lanjut atas Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar Nomor 08/KL/Panwaslukada-PS/VI/ 2010 tertanggal 07 Juni 2010. Apalagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon *incumbent* (ic. Ir. RE Siahaan) yang seharusnya menunjukkan sikap pemimpin yang bersih dan jujur dengan tidak menunjukkan sikap membohongi publik, dan Termohon berdasarkan surat Nomor 270/1797/KPU-PS/VI/2010 tentang Penelusuran Laporan Pelanggaran PemiluKada Kota Pematangsiantar dan atas dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Sdr. Burhan Saragih telah dilaporkan ke Panwaslukada Kota Pematangsiantar dan Polresta Pematangsiantar melalui Surat Nomor 720/1750/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010. Artinya sangat jelas dan terang bahwa Pihak Terkait tegaskan Termohon selaku penyelenggara sama sekali tidak menutup mata atas pelanggaran PemiluKada yang diduga dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon yang diketahui Termohon;

30. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum diatas Pihak Terkait menilai tindakan Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 6 Juni 2010 adalah tindakan tepat dan jujur agar masyarakat Pemilih Kota Pematangsiantar dapat lebih jelas mengetahui identitas para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar lebih utuh menyeleluruh dan selanjutnya atas tindakan Termohon tersebut Pihak Terkait menilai Termohon telah bersikap adil dan setara pada seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar yang lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 yang isinya KPU selaku penyelenggara pemilihan umum berkewajiban memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf f PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
31. Bahwa selain daripada itu Termohon selaku penyelenggara Pemilukada, berkewajiban melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, sehingga adalah suatu hal yang tidak mungkin bila Termohon memenuhi permintaan masyarakat untuk melakukan pencoretan atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 di masa tenang karena sarat dengan resistensi keamanan dan suasana kondusif menjelang pemungutan suara tanggal 9 Juni 2010. Apalagi syarat minimal pendidikan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan/atau sederajat maka menurut Termohon yang menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Juli 2010, Sdr. Burhan Saragih masih memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 adalah tindakan yang tepat dan bijak oleh karena apabila pencoretan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan oleh Termohon sebagaimana rekomendasi Panwaslukada Kota Pematangsiantar maupun beberapa elemen masyarakat menjelang pemungutan suara, sangat tidak mungkin Termohon lakukan oleh karena tidak mungkin mencetak surat suara ulang karena surat suara sudah dicetak dan waktu pencoblosan tinggal 2 (dua) hari lagi terhitung tanggal Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar Nomor 08/KL/Panwaslukada-PS/VI/2010 tertanggal 7 Juni 2010. Apalagi secara ketentuan Undang-Undang, Burhan

Saragih masih memenuhi syarat dengan ijazah SLTA-nya sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar;

32. Bahwa adalah bersifat asumptif dan tidak berdasar hukum sama sekali terkait dalil-dalil posita Pemohon, dimana Pemohon pada dalil-dalil permohonannya mengemukakan Termohon tidak pernah melakukan penelitian dan klarifikasi kepada instansi terkait mengenai keabsahan persyaratan administrasi pendidikan Pihak Terkait. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana intinya dalam dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengemukakan adanya kejanggalan dalam riwayat pendidikan Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) khususnya ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang menurut dalil posita Pemohon menunjukkan bahwa dokumen yang dipergunakan oleh Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) pada saat pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sangat diragukan keabsahannya, dengan alasan-alasan posita Pemohon antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 4 RK Pematang Siantar dan yang dipergunakan oleh Hulman Sitorus sebagai kelengkapan persyarat administrasi pada saat pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010, setelah diteliti kebenarannya oleh Pemohon ternyata Nomor Induk 214 ternyata bukan atas nama Hulman Sitorus melainkan atas nama Riana Naibaho;
2. Bahwa selanjutnya terhadap ijazah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Bumiputera Pematangsiantar, dimana ditemukan kejanggalan oleh Pemohon masa pendidikan SLTP/SMP Hulman Sitorus adalah selama 2 (dua) tahun, karena ijazah SLTP tahun 1970 dan tahun penerbitan ijazah SD tahun 1968. Selanjutnya Pemohon dalam dalil positifnya juga mengemukakan Ijazah SMP Hulman Sitorus diterbitkan di Medan sementara yang bersangkutan sekolah di Pematangsiantar, dan kemudian

dalam dalil positifnya menuduh Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap keabsahan syarat administrasi pendidikan Hulman Sitorus yang artinya Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

33. Bahwa dalil-dalil positif Pemohon pada dalil permohonannya tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak disertai data-data dan fakta hukum yang benar, sebab Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pematangsiantar Tahun 2010, khususnya penelitian dan klarifikasi atas data-data persyaratan administrasi ijazah pendidikan setiap jenjang dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi pada setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana terhadap data-data kelengkapan administrasi pendidikan Pihak Terkait telah dilakukan penelitian dan verifikasi oleh pihak Termohon sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
34. Bahwa ijazah Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) saat mendaftar ke KPU Kota Pematangsiantar terkait ijazah SD-nya setelah diklarifikasi oleh Termohon adalah memang terdaftar di Sekolah Dasar (SD) RK 4, Jalan Pantai Timur, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar. Hal ini telah disampaikan oleh Kepala SD RK 4, Sr. Fidelis br. Manalu, S.Pd. pada Termohon, bahkan sesuai data milik sekolah berdasarkan Buku Induk Agustus 1965, Hulman Sitorus bersekolah di SD RK 4 Wilayah Kota Madya Siantar II dan terdaftar di kelas V tahun 1967 dengan Nomor Induk 214 dan dari sekolah inilah Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 7) memperoleh ijazah SD dan ijazah tersebut ditandatangani Afdon Silalahi sebagai kepala sekolah saat itu dan disahkan Pemilik Sekolah Wilayah Kota Madya Pematangsiantar II, BM .Saragih. Artinya Nomor Induk 214 adalah benar-benar atas nama Hulman Sitorus bukan atas nama Riana Naibaho **(Bukti TK-5)**;
35. Bahwa selanjutnya terkait ijazah SMP Hulman Sitorus tersebut berdasarkan data-data yang diserahkan kepada Termohon terlihat telah dilegalisir Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang ditandatangani Sekretaris Hotma Aritonang.

Terkait masa pendidikan yang dijalani oleh Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) hanya dua tahun, telah dikonfirmasi oleh Termohon pada instansi terkait diperoleh data dan klarifikasi saat kelas 1 dan kelas 2 bahwa Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) benar bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar dan selanjutnya dipindahkan orang tuanya ke kelas III dengan mendaftarkan di SMP Bumiputera dan bersekolah 2 (dua) kali dalam satu hari oleh karena pada masa itu dapat bersekolah dua kali dalam satu hari serta Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) lolos testing untuk diterima di kelas tiga (**Bukti TK-6**);

36. Bahwa selanjutnya berdasarkan data-data ijazah pendidikan yang diserahkan oleh Pihak Terkait pada Termohon telah dileges oleh Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon sangat patut untuk ditolak atau dikesampingkan karena hanya didasari oleh asumsi Pemohon semata tanpa didukung oleh data-data dan fakta hukum yang benar;
37. Bahwa selanjutnya dalam Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2010 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tersebut, Pasangan Calon lain tidak ada yang merasa keberatan atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon, dimana salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan adalah Pihak Terkait yang artinya tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota pematangsiantar Tahun 2010 khususnya oleh Pemohon maupun partai pendukung Pemohon atas ditetapkannya Pihak Terkait sebagai salah satu peserta Pasangan Calon Pemilukada Kota Pematangsiantar tahun 2010;
38. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil posita yang dikemukakan oleh Pemohon atas Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri atas nama pasangan Pihak Terkait (ic. Drs. Koni Ismail Siregar) pada dalil-dalil positanya, sesungguhnya Termohon telah meminta Pihak Terkait untuk mematuhi

Undang-Undang dengan mengajukan pengunduran diri sesuai dengan Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), namun setelah Pihak Terkait menjelaskan Walikota Pematangsiantar (ic. RE. Siahaan Calon Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Pasangan Calon Nomor Urut 2) terkesan memasung hak politik dari Pihak Terkait (ic. Drs.Koni Ismail Siregar) dengan sengaja tidak menerbitkan persetujuannya agar Pasangan Calon Pihak Terkait tidak dapat lolos verifikasi. Oleh karenanya, Pihak Terkait menilai Termohon dalam mengambil kebijakan dengan berdasar pada aturan Konstitusi yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur pada ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3). dan Pasal 28I UUD 1945 yang menyebutkan:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: ***"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"***.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: ***"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"***.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: ***"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"***.

Adalah sikap yang bijaksana dengan tetap menjunjung tinggi Konstitusi yang berlaku, yaitu dengan berpijak pada ketentuan UUD 1945 tersebut, dimana Pihak Termohon menganggap Surat Pengunduran Diri dari Pihak Terkait (ic. Drs. Koni Ismail Siregar) selaku Pasangan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 7, telah memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 (**Bukti TK-7**);

39. Bahwa oleh karena itu pencalonan Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar) sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;

40. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta tersebut di atas maka dalil-dalil posita dari Pemohon pada permohonannya terbukti sama sekali tidak didasari oleh data-data dan fakta-fakta hukum yang jelas dan menjunjung tinggi asas-asas demokrasi yang diatur dalam Konstitusi kita maka adalah patut secara hukum apabila seluruh dalil-dalil posita Pemohon dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak patut untuk ditanggapi secara hukum. Apalagi dalil-dalil posita pemohon maupun petitum pada permohonan dari Pemohon sama sekali tidak terkait dengan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana disebutkan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
41. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari tingkat KPPS, PPK hingga KPU Kota Pematangsiantar, saksi-saksi Pemohon sama sekali tidak ada mengajukan keberatan atas setiap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon beserta jajarannya, sehingga dalil-dalil posita Pemohon, terbukti hanya didasari wujud kekecewaan karena tidak dimenangkan oleh masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar, dan terbukti dari 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 hanya 3 (tiga) Pasangan Calon yang mengajukan keberatan pada Mahkamah Konstitusi atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar telah menerima secara dewasa atas Surat Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Pematangsiantar Tahun 2010 karena Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berlangsung secara adil dan demokratis (**Bukti TK-8**);

42. Bahwa terkait dalil posita Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah dalil-dalil yang tidak didukung oleh data-data dan fakta hukum sama sekali, serta terlihat Pemohon hanya mencoba menggiring asumsi yang sebenarnya tidak didukung oleh fakta, karena berdasarkan data-data Termohon telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana jumlah calon pemilih telah sesuai dengan data yang valid dan Termohon telah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada semua pasangan calon untuk mendapatkannya, sehingga asumsi-asumsi yang coba dibangun oleh Pemohon pada dalil-dalil positanya sangat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
43. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait pemberian barang atau uang oleh Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang lampau dipaksakan oleh Pemohon, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang benar. Begitu pula tuduhan terhadap Pihak Terkait yang memberikan janji-janji atau iming-iming dari Tim Sukses Pihak Terkait merupakan dalil-dalil yang tidak didukung bukti dan fakta-fakta hukum yang benar dan hanya didasari asumsi-asumsi Pemohon semata;
44. Bahwa atas data-data dan fakta hukum di atas, terbukti dalil-dalil posita Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta hukum yang sebenarnya dan perlu ditegaskan pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Termohon telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dimana berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2010 terurai pada kolom atau tabel berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA
1.	Ir. MARHUM SIPAYUNG, M.Si. dan H. EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos.	12.188	10,21 %
2.	Ir. ROBERT EDISON SIAHAAN dan H. BURHAN SARAGIH, S.H.	31.489	26,40 %
3.	Prof. Dr. POLTAK SINAGA, M.Si. dan Drs. JALAEEL SARAGIH	943	0,8 %
4.	HEROHWIN T.F. SINAGA, AP. MSi dan Hj. FRIDA RIANI DAMANIK	4.269	3,58 %
5.	DR. RIA NOVIDA TELAUMBANUA, M.Kes. dan Drs. SURYATNO	3.981	3,34 %
6.	MOH. HERIZA SYAHPUTRA, S.H. dan HORAS SILITONGA	13.804	11,57 %
7.	HULMAN SITORUS, S.E. dan Drs. KONI ISMAIL SIREGAR	39.585	33,18 %
8.	Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes. dan RUPINA ARUAN, S.Pd.	476	0,40 %
9.	FRANS IMMNUEL T. SARAGIH, S.Sos. dan Dra. ROKIBAH HASIBUAN, M.A.	432	0,36 %
10	BARKAT SYAH dan Ir. BOUNDETH DAMANIK	12.118	10,16 %
	<b>J U M L A H</b>	<b>119.285</b>	<b>100%</b>

45. Bahwa selanjutnya dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran adalah berangkat dari asumsi Pemohon semata yang sama sekali tidak didasari oleh fakta-fakta hukum yang sebenarnya, karena proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Pihak Terkait menilai Termohon telah taat pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 2

Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, serta Termohon telah memperlakukan dan menempatkan setiap pasangan calon secara adil dan tidak berpihak dan akhirnya pelaksanaan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dapat berjalan aman, tertib, kondusif, dan sukses;

46. Bahwa selain data-data dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, keseluruhan dalil-dalil posita Pemohon telah dapat dikualifisir masuk dalam koridor atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dan wewenang Panwaslu Kota Pematangsiantar dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 110 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

47. Bahwa terkait dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon agar dilakukan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan dilakukan pemungutan suara ulang Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang diikuti oleh seluruh pasangan calon terkecuali Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena alasan-alasan pemungutan suara ulang di TPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan secara jelas dan terang bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
48. Bahwa dalil-dalil yang didasari oleh asumsi-asumsi semata dari Pemohon adalah merupakan pencideraan atas pengakuan terhadap suara rakyat yang telah menggunakan hak pilih guna memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan terlihat nyata secara jelas dan terang dalil-dalil Pemohon baik posita maupun petitumnya hanya semata-mata mengandung wujud kekecewaan atas kekalahan dan sangat tidak siap atas kekalahan yang diterima tersebut, walaupun pelaksanaan Pemilu di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berjalan secara sukses dan aman, serta demokratis sehingga sama sekali tidak tercipta kerusuhan massal yang berefek pada pengrusakan seperti daerah lainnya. Artinya masyarakat pemilih di Kota Pematangsiantar sangat dewasa menerima hasil Pemilu Tahun 2010 yang telah dilaksanakan sesuai nilai-nilai demokrasi yang diamanatkan dan diatur dalam Konstitusi kita;
49. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil posita Pemohon dengan menuduh Termohon melakukan pelanggaran secara massif, terorganisir, dan sistematis sama sekali tidak relevan dengan data-data dan fakta hukum yang sebenarnya, karena proses penyelenggaraan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terlihat Termohon tetap berpegang pada asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
50. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, dimana dalam pertimbangan pada Putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah Konstitusi bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan bahwa pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 menyatakan:

**Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008:** *“Keberatan sebagaimana berkenaan dengan ayat 1 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”;*

**Pasal 4 PMK 15/2008:** *“Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*

**Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008:**

*Ayat 2 huruf:*

- a. ....*
- b. Uraian yang jelas mengenai:*
  - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - 2. permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - 3. permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonannya adalah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilukada Kota

Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;

51. Bahwa selanjutnya selain data-data dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Pemohon dalam mengajukan keberatannya juga terbukti telah melewati batas waktu sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara tegas dan jelas disebutkan:

*Ayat (1) : Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Kosntitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;*

*Ayat (2) : Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregisterasi.*

52. Bahwa selanjutnya berdasarkan data dan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan Berita Acara Pleno Terbuka dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang **Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2010;**

53. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tenggat waktu pengajuan permohonan pembatalan paling lambat 3 (tiga) hari, yaitu terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010, bukan pada hari Senin tanggal 21 juni 2010 sebagaimana asumsi dari Pemohon dalam pengajuan permohonan keberatannya, sehingga apabila dilihat jadwal pendaftaran permohonan yang dimajukan oleh Pemohon, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 maka berdasarkan jadwal pengajuan permohonan Pemohon pada hari Senin tanggal 21 juni 2010 serta merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010, pengajuan keberatan Pemohon telah melewati batas waktu (daluwarsa) yang

ditentukan oleh ketentuan yang berlaku (*vide* Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 21 Juni 2010);

54. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil yang disampaikan sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 8, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terurai di atas, serta dalil-dalil posita yang dipaparkan oleh Pemohon hanya semata-mata berangkat dari asumsi-asumsi terkait pelanggaran administratif pada proses tahapan yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum sehingga sudah selayaknya dan patut secara hukum seluruh dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan klijke verklaard*);

55. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau menyatakan setidaknya tidaknya permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijkeverklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dan dikemukakan tersebut di atas maka Pihak Terkait mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

- Menerima dalil-dalil eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Jawaban Pihak Terkait seluruhnya;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2010;
  - b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
  - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
  - b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

- c. Berita Acara Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menerima hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
8. Memerintahkan Pemohon untuk mentaati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 tentang Penetapan

- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
  3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
  4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Surat Nomor C.32/LSM-APPI/SS/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal KPUD Pematangsiantar tidak Profesional/Selektif terhadap ijazah SD dan SMP Sdr. Hulman Sitorus, S.E. yang diterbitkan oleh Surat Assosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia;
  5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 083/E.14/SD-CR4/ST/2010 tertanggal 10 Maret 2010 yang diterbitkan Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yoseph Medan “SD SWASTA RK NO.4” Pematangsiantar yang ditandatangani oleh Sr. Fidelis Manalu, S.Pd.;
  6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Ijazah SMP Bumiputra atas nama Hulman Sitorus dengan Nomor Sertifikat Ijazah LPA047494 yang diterbitkan 21 November 1970 yang ditandatangani oleh Panitia Ujian W. Parhusip dan N. Silalahi yang disahkan oleh Kepala Dinas

Pendidikan Kota Pematangsiantar;

7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Pihak Terkait (ic. Drs. Koni Ismail Siregar) selaku Pasangan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 7;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Kliping Berita Online Sumut Cyber Media yang berjudul “Ijazah Hulman Terdaftar di SD RK 4” tertanggal 19 Juni 2010;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Kliping Berita Online MedanPunya.com tertanggal 09 April 2010 Pukul 11.23 WIB yang berjudul “KPUD Siantar Tetapkan 10 Pasangan Calon Walikota”;
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Kliping Berita Online Borsak Mangatasi Nababan tertanggal 17 Juni 2010 dengan judul berita “Hoki ditetapkan Calon Terpilih Menjadi Walikota-Wakil Walikota Pematangsiantar”;
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Sitalasari (Model DA-

KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;

14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Utara (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Timur (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marimbun (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;

20. Bukti PT - 20 : Fotokopi Kliping Berita Digital Cyber Zone tanggal 19 Maret 2010 dengan judul "Izin Atasan Bukan Syarat Mutlak" sebagai penjelasan Anggota KPU Pusat Abdul Azis;
21. Bukti PT - 21 : Fotokopi Kliping Berita Digital SumutPos.com tanggal 23 Maret 2010 dengan judul "Mendagri: Izin Atasan Boleh Diabaikan" sebagai penjelasan Anggota KPU Pusat Abdul Azis;
22. Bukti PT - 22 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK-KPU-PS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar tertanggal 9 April 2010;
23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba tertanggal 8 April 2010;
24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Timur tertanggal 8 April 2010;
25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat tertanggal 8 April 2010;
26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 8 April 2010;
27. Bukti PT - 27 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan

- Kecamatan Siantar Marimbun tertanggal 8 April 2010;
28. Bukti PT - 28 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat tertanggal 8 April 2010;
29. Bukti PT - 29 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Sitalasari tertanggal 8 April 2010;
30. Bukti PT - 30 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Utara tertanggal 8 April 2010;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010; dan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar

Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili

terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Pematangsiantar dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-1**); dan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-2**) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 dan

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 2 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-3**) dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-4**);

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan sangat terkait erat dengan eksepsi yang diajukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait sehingga Mahkamah akan memberikannya terlebih dahulu. Dalam Jawaban dan Keterangannya baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Materi keberatan Pemohon di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi (kompetensi absolut);
2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau bersifat kabur (*obscur libellium exceptie*);
3. Permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas pengajuan permohonan keberatan;

4. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
5. Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (daluwarsa);

**[3.10]** Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan **[3.5]**, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak beralasan hukum. Sementara itu, terhadap eksepsi terkait permohonan Pemohon yang tidak jelas atau bersifat kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi formalitas serta kualitas pengajuan permohonan keberatan, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut.

**[3.10.1]** Bahwa Mahkamah dalam mengadili perselisihan PemiluKada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta PemiluKada mengenai hasil penghitungan suara PemiluKada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses PemiluKada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas PemiluKada, Penyelenggara PemiluKada, dan aparaturnya penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Namun demikian, apabila fakta hukum dalam proses penyelenggaraan PemiluKada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga memengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan PemiluKada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas yang Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

**[3.10.2]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan pada angka 2 dan angka 3 di atas tidak tepat menurut hukum, karena isi

eksepsi sangat berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi Pihak Terkait harus dikesampingkan;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap:

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-1**); dan
2. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-2**);

Terhadap keberatan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan

kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 bertanggal 15 Juni 2010 (**vide Bukti P-16 dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3**). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah beralasan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa selain objeknya tidak tepat, juga berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 ditentukan, “(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu **paling lambat 3 (tiga) hari** setelah penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, “(1) Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”. Oleh karena objek permohonan yang sebenarnya adalah Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang ditetapkan pada hari Selasa, 15 Juni 2010 sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.12] di atas maka tenggang waktu permohonan pembatalan hasil

penghitungan suara Pemilu adalah 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 15 Juni 2010, yaitu **Rabu, 16 Juni 2010**; **Kamis, 17 Juni 2010**; dan hari terakhir yakni **Jumat, 18 Juni 2010**. Sedangkan, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari **Senin, 21 Juni 2010** Pukul 16.45 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 221/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 15 Juli 2010). Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan juga beralasan hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah menilai eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai kesalahan objek permohonan (*error in objecto*) dan pengajuan permohonan telah melampaui tenggang waktu adalah beralasan dan berdasar hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok permohonan.

**[3.15]** Menimbang bahwa Mahkamah pada hari Senin, 19 Juli 2010 telah menerima Surat Pemohon bertanggal **17 Juli 2010** perihal Penarikan Perkara dan Berkas Permohonan Nomor 63/PHPU.D-VIII/2010 yang ditandatangani oleh Martin O. Simanjuntak, S.H. selaku Kuasa Hukum Pemohon yang menggantikan Kuasa Hukum Pemohon sebelumnya dari "Fadillah Hutri Lubis & Partners" yang telah dicabut kuasanya oleh Pemohon berdasarkan Surat bertanggal 17 Juli 2010 perihal Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2010. Terhadap permohonan penarikan perkara *a quo*, Mahkamah menilai bahwa penarikan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Mahkamah telah memeriksa dan mengambil Putusan atas perkara *a quo* melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari **Jumat, 16 Juli 2010**. Oleh karena itu, Pemohon Perkara Nomor 63/PHPU.D-VIII/2010 masih tetap berkedudukan sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan hukum;
- [4.4] Pengajuan permohonan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selebihnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal enam belas Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Pan Mohamad Faiz**